

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
TAHUN ANGGARAN 2017**

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017

JL.BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN DENPASAR BALI

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Denpasar, 31 Desember 2017

Kepala Balai,

Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 19720929 199903 1 001

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Pernyataan Telah Direviu	
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Ringkasan	8
I Laporan Realisasi Anggaran	10
II Neraca	11
III Laporan Operasional	12
IV Laporan Perubahan Ekuitas	13
V Catatan atas Laporan Keuangan	
A Penjelasan Umum	14
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1 Pendapatan	22
B.2 Belanja	23
B.2.1 Belanja Pegawai	24
B.2.2 Belanja Barang	25
B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25
B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26
B.2.5 Belanja Modal Lainnya	26
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1 Aset Lancar	27
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	27
C.1.2 Persediaan	27
C.2 Aset Tetap	28
C.2.1 Tanah	28
C.2.2 Peralatan dan Mesin	28
C.2.3 Gedung dan Bangunan	29
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	30
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
C.3 Aset Lainnya	31
C.3.1 Aset Tak Berwujud	31

C.4	Kewajiban Jangka Pendek	32
C.4.1	Uang Muka dari KPPN	32
C.5	Ekuitas	32
C.5.1	Ekuitas	32
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	33
D.2	Beban Pegawai	33
D.3	Beban Persediaan	34
D.4	Beban Barang dan Jasa	35
D.5	Beban Pemeliharaan	35
D.6	Beban Perjalanan Dinas	36
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	36
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	37
D.9	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	38
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	
E.1	Ekuitas Awal	39
E.2	Surplus/Defisit-LO	39
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	39
E.4.1	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	39
E.4.2	Penyesuaian Nilai Aset	39
E.5	Transaksi Antar Entitas	39
E.6	Ekuitas Akhir	40
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	41
F.2	Pengungkapan Lain-lain	41

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Denpasar, 31 Desember 2017
Kepala Balai,


Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
NIP. 19720929 199903 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp133,289,385.00 atau mencapai 261.16% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp51,037,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp14,056,281,369.00 atau mencapai 98.54% dari alokasi anggaran sebesar Rp14,264,733,000.00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp24,860,737,642.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1,262,887,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp23,373,788,509.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp224,062,133.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp47,483,000.00 dan Rp24,813,254,642.00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp96,744,385.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp14,551,849,788.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-14,455,105,403.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp36,195,000.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-14,418,910,403.00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp25,296,241,811.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-14,418,910,403.00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp1,528,750.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13,937,451,984.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp24,813,254,642.00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	51,037,000.00	133,289,385.00	261.16	91,126,418.00
Jumlah Pendapatan		51,037,000.00	133,289,385.00	261.16	91,126,418.00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Pegawai	B.2.1	6,595,533,000.00	6,499,604,826.00	98.55	6,607,251,678.00
Belanja Barang	B.2.2	6,341,200,000.00	6,277,056,043.00	98.99	8,941,743,175.00
Jumlah Belanja Operasional		12,936,733,000.00	12,776,660,869.00	98.76	15,548,994,853.00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	1,328,000,000.00	1,279,620,500.00	96.36	486,450,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	B.2.5	0	0	0	9,975,600.00
Jumlah Belanja Modal		1,328,000,000.00	1,279,620,500.00	96.36	496,425,600.00
Jumlah Belanja		14,264,733,000.00	14,056,281,369.00	98.54	16,045,420,453.00

II. NERACA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1	1,262,887,000.00	2,198,810,500.00
Jumlah Aset Lancar		1,262,887,000.00	2,198,810,500.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	18,181,247,000.00	18,181,247,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	7,046,700,558.00	5,900,654,058.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	4,198,611,911.00	4,248,965,911.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	244,236,000.00	553,464,250.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	95,721,850.00	95,721,850.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-5,112,352,501.00	-4,584,260,057.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7	-1,224,561,204.00	-1,137,109,475.00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.8	-55,815,105.00	-170,185,976.00
Jumlah Aset Tetap		23,373,788,509.00	23,088,497,561.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	17,415,000.00	11,765,000.00
Aset Lain-lain	C.3.2	570,201,250.00	330,814,578.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	-363,554,117.00	-333,645,828.00
Jumlah Aset Lainnya		224,062,133.00	8,933,750.00
Jumlah Aset		24,860,737,642.00	25,296,241,811.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada pihak ketiga	C.4.1	47,483,000.00	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		47,483,000.00	0
Jumlah Kewajiban		47,483,000.00	0
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	24,813,254,642.00	25,296,241,811.00
Jumlah Ekuitas		24,813,254,642.00	25,296,241,811.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		24,860,737,642.00	25,296,241,811.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	96,744,385.00	82,091,250.00
JUMLAH PENDAPATAN		96,744,385.00	82,091,250.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,547,087,826.00	6,607,251,678.00
Beban Persediaan	D.3	1,319,530,695.00	1,669,715,550.00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,872,752,517.00	1,758,552,479.00
Beban Pemeliharaan	D.5	463,985,490.00	526,105,376.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,362,077,341.00	2,797,311,270.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	2,194,633,500.00	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	791,782,419.00	739,479,923.00
JUMLAH BEBAN		14,551,849,788.00	14,098,416,276.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-14,455,105,403.00	-14,016,325,026.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	33,800,000.00	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	D.10	350,000.00	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	2,745,000.00	9,035,168.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		36,195,000.00	9,035,168.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-14,418,910,403.00	-14,007,289,858.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	25,296,241,811.00	23,262,249,122.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-14,418,910,403.00	-14,007,289,858.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-1,528,750.00	36,409,512.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	-1,528,750.00	36,409,512.00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.2	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	13,937,451,984.00	16,004,873,035.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	482,987,169.00	2,033,992,689.00
EKUITAS AKHIR		24,813,254,642.00	25,296,241,811.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PENKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI

Sesuai dengan Permentan Nomor 16 Tahun 2006 tupoksi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi spesifik lokasi. Sebagai UPT Pusat di daerah, BPTP Bali juga bertugas melakukan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian yang cenderung meningkat dan hamper seluruh program tersebut diimplementasikan di wilayah kerja BPTP Bali. Selain itu juga BPTP Bali mengemban tugas administrasi sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang dan Wilayah. Dalam upaya peningkatan efisiensi tupoksi diperlukan koordinasi dan sinergi dalam program dan kegiatan BPTP dengan seluruh UK/UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian agar lebih berdaya guna. Pendayagunaan unit kerja didasarkan pada potensi yang tersedia, baik sumberdaya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang tersedia.

Sejalan dengan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2015 – 2019, untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan inovasi pertanian mendukung terwujudnya system pertanian bio industri, maka visi BPTP Bali adalah “Menjadi lembaga terdepan pengkajian dan pengembangan inovasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi dalam mewujudkan system pertanian bio industri tropika berkelanjutan di Bali bertaraf internasional”. Beranjak dari visi dan misi yang ada, strategi utama BPTP Bali tahun 2015 – 2019 ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya BPTP Bali dan dukungan pemerintah Propinsi Bali serta Kabupaten/kota dan pihak lain secara optimal guna peningkatan kapasitas institusi.
2. Mempertajam skala prioritas program dan kegiatan serta memperkuat keterkaitan dan keselarasan program BPTP Bali dengan program unggulan daerah.
3. Membangun sinergisme program antara BPTP dengan Puslit/BB/LRPI dan Balit serta dengan berbagai lembaga penelitian pertanian dari dalam dan luar negeri.
4. Mendapatkan dan mendistribusikan inovasi teknologi dan rekayasa kelembagaan yang berorientasi mendukung pembangunan pertanian daerah.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak

sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa

hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran, penambahan PAGU APBNP, penyesuaian kebutuhan belanja pegawai serta penyesuaian akun dan detil kegiatan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	43,937,000.00	43,937,000.00
Pendapatan Jasa	7,100,000.00	7,100,000.00
Jumlah Pendapatan	51,037,000.00	51,037,000.00
Belanja		
Belanja Pegawai	6,510,533,000.00	6,595,533,000.00
Belanja Barang	6,193,200,000.00	6,341,200,000.00
Belanja Modal	176,000,000.00	1,328,000,000.00
Jumlah Belanja	12,879,733,000.00	14,264,733,000.00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp133,289,385.00 atau mencapai 261.16% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp51,037,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	36,002,000.00	121,849,550.00	338.45
Pendapatan Jasa	15,035,000.00	8,694,835.00	57.83
Pendapatan Lain-lain	0.00	2,745,000.00	0
Jumlah	51,037,000.00	133,289,385.00	261.16

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 46.27% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Pendapatan dari pemindahtangan BMN Lainnya serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	121,849,550.00	74,291,250.00	64.02
Pendapatan Jasa	8,694,835.00	7,800,000.00	11.47
Pendapatan Lain-lain	2,745,000.00	9,035,168.00	(69.62)
Jumlah	133,289,385.00	91,126,418.00	46.27

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp14,056,281,369.00 atau 98.54% dari anggaran belanja sebesar Rp14,264,733,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	6,595,533,000.00	6,499,604,826.00	98.55
Belanja Barang	6,341,200,000.00	6,277,056,043.00	98.99
Belanja Modal	1,328,000,000.00	1,279,620,500.00	96.36
Total Belanja Kotor	14,264,733,000.00	14,056,281,369.00	98.54
Pengembalian Belanja			
Total Belanja	14,264,733,000.00	14,056,281,369.00	98.54

Realisasi Belanja 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 12.40% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi pada belanja barang sebesar 29.80% akibat adanya kebijakan anggaran dari Badan Litbang Pertanian terkait dengan fokus program/kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus program tersebut menyangkut kegiatan mandatory dan kegiatan in house. Perbandingan penurunan realisasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	.%
Belanja Pegawai	6,499,604,826.00	6,607,251,678.00	(1.63)
Belanja Barang	6,277,056,043.00	8,941,743,175.00	(29.80)
Belanja Modal	1,279,620,500.00	496,425,600.00	157.77
Total Belanja	14,056,281,369.00	16,045,420,453.00	(12.40)

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6,499,604,826.00 dan Rp6,607,251,678.00. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 1.63% dari TA 2016. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya pegawai yang pensiun sebanyak 2 orang atas nama I Made Alus di bulan Nopember 2016 dan I Ketut Suparta, SH di bulan April 2016.
2. Adanya 1 orang pegawai mutasi pindah ke instansi lain atas nama Dr. Suharyanto, SP, MP di bulan Desember 2016.
3. Gaji ke 13 dan 14 (THR) tahun 2016 realisasi bulan Juni 2016 sedangkan pada tahun 2017 realisasi bulan Juli 2017.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6,516,209,899.00	6,619,646,738.00	(1.56)
Belanja Lembur	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	6,516,209,899.00	6,619,646,738.00	(1.56)
Pengembalian Belanja Pegawai	-16,605,073.00	-12,395,060.00	33.97
Jumlah Belanja	6,499,604,826.00	6,607,251,678.00	(1.63)

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6,277,056,043.00 dan Rp8,941,743,175.00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar 29.80% dari TA 2016.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	400,636,650.00	286,286,950.00	39.94
Belanja Barang Non Operasional	1,228,825,900.00	1,096,401,650.00	12.08
Belanja Barang Persediaan	1,386,473,945.00	1,824,119,550.00	(23.99)
Belanja Jasa	243,289,967.00	375,863,879.00	(35.27)
Belanja Pemeliharaan	397,277,240.00	367,126,376.00	8.21
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,362,077,341.00	2,797,311,270.00	(51.31)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1,208,705,000.00	2,194,633,500.00	(44.92)
Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	49,770,000.00	0	-
Jumlah Belanja Kotor	6,277,056,043.00	8,941,743,175.00	(29.80)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	
Jumlah Belanja	6,277,056,043.00	8,941,743,175.00	(29.80)

B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7,048,960,938.00 dan Rp5,902,914,438.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 19.41% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan nilai aset dari pembelian berupa 2 unit roda empat, 6 unit kendaraan bermotor roda tiga, 3 unit kendaraan roda, 5 unit tractor tangan, 1 buah tractor mobil, peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan kantor dengan total nilai sebesar Rp1,279,620,500.00 dan transfer masuk berupa laptop sebesar Rp.10.230.000,00. Perbandingan realisasi anggaran untk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,048,960,938.00	5,902,914,438.00	19.41
Jumlah Belanja Kotor	7,048,960,938.00	5,902,914,438.00	19.41
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	7,048,960,938.00	5,902,914,438.00	19.41

B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dibandingkan TA 2016 karena tidak adanya realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.2.5 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp9,975,600.00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2017 mengalami penurunan sebesar -100% dibandingkan TA 2016.

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0.00	9,975,600.00	-100
Jumlah Belanja Kotor	0.00	9,975,600.00	-100
Pengembalian Belanja	-	0	0
Jumlah Belanja	0.00	9,975,600.00	-100

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rekening Bank	-	0
Uang tunai	-	0
Kwitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	0
Jumlah	-	0

C.1.2 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,262,887,000.00 dan Rp2,198,810,500.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	235,000.00	0
Suku Cadang	4,177,000.00	4,177,000.00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1,015,355,000.00	1,993,257,500.00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	49,770,000.00	
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	193,350,000.00	76,750,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0.00	124,626,000.00
Jumlah	1,262,887,000.00	2,198,810,500.00

Adapun rincian nilai persediaan sebagai berikut :

1. Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp977,902,500.00,- merupakan nilai 526 berupa gedung bangunan yang berlokasi di kegiatan TTP di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Belanja 526 ini sudah diserahkan-terimakan sesuai BAST dari Setjen Kementerian Pertanian.
2. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp49,770,000.00 berupa ternak kambing sebanyak 20 ekor yang berlokasi di kegiatan TTP di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Belanja 526 ini belum diserahkan-terimakan karena belum ada BAST.
3. Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp76,750,000.00,- merupakan nilai 526 berupa televisi LED, layar proyektor dan LCD infocus yang berlokasi di kegiatan TTP di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Belanja 526 ini sudah diserahkan-terimakan sesuai BAST dari Setjen Kementerian Pertanian.
3. Jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp124.626.000,00,- merupakan nilai 526 berupa adanya pembelian jalan irigasi yang berlokasi di kegiatan TTP di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Belanja 526 ini sudah diserahkan-terimakan sesuai BAST dari Setjen Kementerian Pertanian.

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp18,181,247,000.00 dan Rp18,181,247,000.00.

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	13,832.00m2	By Pass Ngurah Rai Rt.Pesanggara, Denpasar Selatan	18,181,247,000.00
Jumlah			18,181,247,000.00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2,172,369,882.00 dan Rp5,900,654,058.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	5,900,654,058.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1,279,620,500.00
Transfer Masuk	10,230,000.00
Mutasi Kurang	-143,804,000.00
Saldo per 31 Desember 2017	7,046,700,558.00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2017	4,874,330,676.00
Nilai Buku per 30 September 2017	2,172,369,882.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa :

1. Adanya pembelian sebesar Rp1,279,620,500.00 yang terdiri dari : 2 buah laptop, 1 buah mesin penepung beras, 2 buah timbangan elektronik, 1 buah grain tester, 1 buah PC unit, 1 buah handy cam, 1 buah camera, 2 buah printer, 5 unit traktor tangan, 1 unit traktor mobil dan 1 buah compact disk recorder.
2. Adanya transfer masuk dari BBP2TP berupa 1 buah laptop Lenovo sebesar Rp10,230,000.00,-

Terdapat mutasi kurang pada peralatan dan mesin sebesar Rp143,804,000.00 berupa : 1 unit traktor, 1 unit alat pengaduk, 1 unit alat pengolah tepung, 1 unit alat pemipil jagung dan 1 unit alat pengering.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BALAI PENKKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4,198,611,911.00 dan Rp4,248,965,911.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	4,248,965,911.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	0.00
Mutasi Kurang	
Penghentian penggunaan	-50,354,000.00
Saldo per 31 Desember 2017	4,198,611,911.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	-1,224,561,204.00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	2,974,050,707.00

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp244,236,000.00 dan Rp553,464,250.00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	553,464,250.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Penghentian aset dari penggunaan	(309,228,250.00)
Saldo per 31 Desember 2017	244,236,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	55,815,105.00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	188,420,895.00

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI per 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp95,721,850.00 dan Rp95,721,850.00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	95,721,850.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0.00
Saldo per 31 Desember 2017	95,721,850.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku per 31 Desember 2017	95,721,850.00

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BALI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6,392,728,810.00 dan Rp5,891,555,508.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7,046,700,558.00	5,112,352,501.00	1,934,348,057.00
2	Gedung dan Bangunan	4,198,611,911.00	1,224,561,204.00	2,974,050,707.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	244,236,000.00	55,815,105.00	188,420,895.00
4	Aset Tetap Lainnya	95,721,850.00	0	95,721,850.00
Akumulasi Penyusutan		11,585,270,319.00	6,392,728,810.00	5,192,541,509.00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp17,415,000.00 dan Rp11,765,000.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	11,765,000.00
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	5,650,000.00
Mutasi Kurang	0.00
Saldo per 31 Desember 2017	17,415,000.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	7,577,500.00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	9,837,500.00

1. Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah adanya transfer masuk berupa formula ransum itik potong dan proses memproduksi kopi luwak dari BPATP Bogor sebesar Rp5,650,000.00
2. Tidak terdapat mutasi kurang

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	11,300,000.00
Software	6,115,000.00
Jumlah	17,415,000.00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp47,483,000.00 dan Rp0.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Adanya kewajiban jangka pendek berupa hutang kepada pihak ketiga yaitu uang makan bulan Desember 2017 yang belum dibayarkan karena revisi penambahan uang makan terbit tanggal 13 Desember 2017 sedangkan batas pengajuan UP ke KPPN batas waktunya tanggal 8 Desember 2017.

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 24,813,254,642.00 dan Rp 25,296,241,811.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp133,289,385.00 dan Rp91,126,418.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	76,200,000.00	61,740,000.00	23.42
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	11,849,550.00	12,551,250.00	(5.59)
Pendapatan Jasa Lainnya	8,675,000.00	7,800,000.00	11.22
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	2,745,000.00	9,035,168.00	(69.62)
Pendapatan dari pemindahtangan BMN Lainnya	33,800,000.00	0.00	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (jasa giro)	19,835.00	0.00	#DIV/0!
Jumlah	133,289,385.00	91,126,418.00	46.27

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6,547,087,826.00 dan Rp6,607,251,678.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	4,307,371,600.00	4,301,870,380.00	0.13
Beban Pembulatan Gaji PNS	57,818.00	57,073.00	1.31
Beban Tunj. Anak PNS	101,544,122.00	101,596,580.00	(0.05)
Beban Tunj. Beras PNS	250,997,080.00	255,642,600.00	(1.82)
Beban Tunj. Fungsional PNS	877,625,000.00	959,015,000.00	(8.49)
Beban Tunj. PPh PNS	41,294,926.00	88,781,551.00	(53.49)
Beban Tunj. Struktural PNS	4,680,000.00	13,860,000.00	(66.23)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	310,314,280.00	310,335,494.00	(0.01)
Beban Tunjangan Umum PNS	110,640,000.00	114,535,000.00	(3.40)
Beban Uang Makan PNS	542,563,000.00	461,558,000.00	17.55
Pengembalian Belanja			
Jumlah	6,547,087,826.00	6,607,251,678.00	(0.91)

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,319,530,695.00 dan Rp1,669,715,550.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan konsumsi	368,746,750.00	708,531,550.00	-48
Beban Persediaan bahan baku	277,870,500.00	367,210,750.00	-24
Beban persediaan lainnya	672,913,445.00	593,973,250.00	13
Jumlah	1,319,530,695.00	1,669,715,550.00	-21

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,872,752,517.00 dan Rp1,758,552,479.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Bahan	475,463,200.00	507,368,650.00	(6.29)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	653,987,700.00	484,858,000.00	34.88
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	130,080,000.00	104,280,000.00	24.74
Beban Honor Output Kegiatan	99,375,000.00	104,175,000.00	(4.61)
Beban Jasa Konsultan	25,000,000.00	17,000,000.00	47.06
Beban Jasa Profesi	67,200,000.00	204,700,000.00	(67.17)
Beban Keperluan Perkantoran	267,701,300.00	179,088,500.00	49.48
Beban Langganan Air	11,165,710.00	23,467,830.00	(52.42)
Beban Langganan Listrik	98,903,718.00	104,493,878.00	(5.35)
Beban Langganan Telepon	39,520,539.00	24,202,171.00	63.29
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,855,350.00	2,918,450.00	(2.16)
Beban Sewa	1,500,000.00	2,000,000.00	(25.00)
Jumlah	1,872,752,517.00	1,758,552,479.00	6.49

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp463,985,490.00 dan Rp526,105,376,000.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	118,175,800.00	100,366,580.00	17.74
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	252,305,940.00	249,922,296.00	0.95
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	93,503,750.00	175,816,500.00	(46.82)
Jumlah	463,985,490.00	526,105,376.00	(11.81)

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,041,614,386.00 dan Rp2,797,311,270.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1,029,154,814.00	1,710,664,354.00	(39.84)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	3,750,000.00	(100.00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,000,000.00	267,710,000.00	(98.88)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	329,922,527.00	815,186,916.00	(59.53)
Jumlah	1,362,077,341.00	2,797,311,270.00	(51.31)

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1,993,257,500	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	76,750,000	0	#DIV/0!
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	124,626,000	0	#DIV/0!
Jumlah	2,194,633,500	0	#DIV/0!

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp791,782,419.00 dan Rp739,479,923.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	670,617,694.00	625,956,853.00	7.13
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	96,821,411.00	91,771,611.00	5.50
Beban Penyusutan Irigasi	7,482,783.00	8,884,444.00	(15.78)
Beban Penyusutan Jaringan	6,159,935.00	11,877,015.00	(48.14)
Beban Amortisasi Paten	847,500.00	565,000.00	50.00
Beban Amortisasi software	1,528,750.00	0.00	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	8,324,346.00	425,000.00	1,858.67
Jumlah	791,782,419.00	739,479,923.00	7.07

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	33,800,000.00		0
Beban Pelepasan Aset Non Lanacar Lalu	350,000.00		0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,745,000.00	9,035,168.00	69.61
Jumlah	36,195,000.00	9,035,168.00	300.60

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional diperoleh dari hasil lelang aset peralatan dan mesin yang sudah rusak berat dan tidak digunakan untuk operasional kantor berupa kendaraan roda empat dan roda dua serta meubelair.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp25,296,241,811.00 dan Rp23,262,249,122.00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-14,418,910,403.00 dan Rp14,007,289,858-.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1,528,750.00 dan Rp36,409,512.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4.2 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp13,937,451,.00 dan Rp16,004,873,035.00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	14,056,281,369.00
Diterima dari Entitas Lain	(133,289,385.00)
Transfer Masuk	14,460,000.00
Jumlah	13,937,451,984.00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp24,813,254,642.00 dan Rp25,296,241,811.00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali mempunyai kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berupa satu kegiatan KP4S dengan judul “Pengendalian OPT dengan Pestisida Biorasional Kisela 866 Mendukung Proliga Bawang Merah” dengan Nomer Kontrak : 76.43/PL040/H.1/04/2017k tanggal 20 April 2017 dengan jangka waktu 20 April sampai dengan 15 Desember 2017 dengan realisasi Rp223,804,987.00 dari total anggaran Rp229,160,000.00. Dana kegiatan ini terdiri dari atas dua tahap yaitu Termin I Rp206,244,000.00,- dan Termin II Rp22,916,000.00.
2. Semua nilai persediaan sebesar Rp1,258,475,000.00 diperoleh dari akun 526 tahun anggaran 2017 yang keberadaan barang-barang tersebut berada di tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Seluruh persediaan tersebut belum di dukung dengan BAST dari Eselon 1.
3. Terkait pemeriksaan BPK RI tanggal 7 s/d 15 Desember 2017 terdapat temuan berupa Aset Tetap sebesar Rp1,591,666,250.00 yang sulit dipantau kondisinya.
4. Adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 480/KPTS/KP.230/8/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat Pelaksana (Eselon V). Adapun pejabat yang diganti atas nama :
 - Kuasa Pengguna Anggaran dari Ir. Anak Agung Ngurah Agung Kamandalu, M.Si kepada Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari I Ketut Mahaputra, SP, MP kepada Pekik Anggoro, SP
 - Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan dan Pengkajian dari Ir.. I Ketut Kariada, M.Sc kepada I Nyoman Adijaya, SP, MP.
5. Terdapat 6 (enam) kali revisi Pagu dan POK pada Tahun 2017 sebagai berikut :
 - Revisi pertama tanggal 16 Mei 2017 dari sumber dana awal sebesar Rp12,879,733,000,- menjadi Rp12,959,733,000,- karena adanya penambahan pagu kegiatan Gertam Cabai.
 - Revisi kedua tanggal 20 Juli 2017 dari sumber dana sebesar Rp12,959,733,000,- menjadi Rp12,809,733,000,- adanya self blocking
 - Revisi ketiga tanggal 16 Agustus 2017 dari sumber dana Rp12,809,733,000,- menjadi Rp14,179,733,000,- adanya penambahan dana APBN-P Perbenihan

- Revisi keempat tanggal 28 September 2017 dari sumber dana Rp14,179,733,000,- menjadi Rp14,179,733,000,- adanya perubahan KPA dan PP-SPM
 - Revisi kelima tanggal 29 Nopember 2017 dari sumber dana Rp14,179,733,000,- menjadi Rp14,179,733,000,- adanya perubahan POK
 - Revisi keenam tanggal 13 Desember 2017 dari sumber dana Rp14,179,733,000,- menjadi Rp14,264,733,000,- adanya penambahan pagu belanja pegawai
6. BPTP Bali mendapat dana APBN-P yang masuk dalam DIPA BPTP Bali sebesar Rp1,370,000,000,- berupa :
- a. Kegiatan perbenihan komoditas Kelapa sebesar Rp92,000,000,-
 - b. Kegiatan perbenihan komoditas Kopi Arabika sebesar Rp66,000,000,-
 - c. Kegiatan perbenihan komoditas Salak sebesar Rp60,000,000,-
 - d. Belanja modal sarana pendukung benih Hortikultura sebesar Rp60,000,000,-
 - e. Belanja modal sarana pendukung benih Perkebunan sebesar Rp1,092,000,000,-